

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dalam pembahasan di bab II dan III menyangkut bagaimana upaya diplomasi komersial Indonesia dalam menyikapi sertifikasi RSPO dengan menggunakan kerangka konseptual kepentingan nasional dan diplomasi komersial. Dapat disimpulkan Indonesia melakukan upaya berdasarkan adanya kepentingan yang belum tercapai seperti belum tercapainya kesejahteraan petani dan tingkat kemiskinan yang masih tinggi yang diakibatkan dari adanya sertifikasi RSPO. Serta, adanya permasalahan yang diakibatkan dari adanya sertifikasi RSPO ini seperti, adanya isu negatif yang mengakibatkan sulitnya CPO Indonesia masuk ke Eropa, perlunya biaya yang mahal untuk mendapatkan sertifikasi RSPO serta petani yang merasa dirugikan. Hal demikian yang membuat pemerintah Indonesia berupaya menyikapi permasalahan tersebut dan untuk tercapainya kepentingan nasional Indonesia.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan konsep diplomasi komersial, dalam diplomasi komersial negara menjadi aktor utama dalam diplomasi komersial. Meskipun berperan sebagai aktor utama, negara bukanlah aktor tunggal. Peran swasta, individu/pelaku bisnis, konsumen, sistem perdagangan internasional, dan kelompok masyarakat juga memiliki peran dalam menentukan keberhasilan diplomasi komersial sebuah negara. Semua itu terdapat didalam *value chain* diplomasi komersial, yaitu rangkaian – rangkaian nilai yang saling mempengaruhi, yaitu antara sektor bisnis dan swasta.

Dalam *value chain* terdapat beberapa aspek yang dibutuhkan oleh diplomat komersial dalam melakukan diplomasi serta kegiatan yang dilakukan oleh diplomat komersial. Ada 9 aspek yang terbagi dari sektor pemerintah yaitu *intelligence, networking & public relations, contract negotiator of implementation, problem-solving*, dan sektor bisnis yaitu *trade promotion, promotion of FDIS, co-operation in science & technology, promotion of tourism, advocacy for national business community*.

Namun, dari 9 aspek tersebut hanya 8 aspek yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian dalam penelitian ini, *promotion of tourism* tidak termasuk karena dalam penelitian ini tidak menjelaskan promosi pariwisata. Dari ke 8 aspek tersebut menjelaskan hubungan antara pemerintah dan swasta dalam melakukan upaya diplomasi komersial serta menjelaskan aktor – aktor yang terlibat didalamnya dan kepentingan masing – masing aktor.

Sebagaimana yang terdapat dalam bab IV, upaya diplomasi komersial yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dilakukan demi tercapainya kepentingan nasional, yaitu terciptanya kesejahteraan petani dan mengurangi tingkat kemiskinan.

5.2 Saran

RSPO merupakan sertifikasi minyak sawit berkelanjutan yang dikeluarkan oleh Uni Eropa. RSPO harus dimiliki oleh perusahaan – perusahaan perkebunan kelapa sawit yang ingin mengekspor CPO ke Uni Eropa. Namun, bagi Indonesia RSPO dinilai memiliki banyak dampak negatif yang mempengaruhi pelaku usaha sawit dan ekspor kelapa sawit Indonesia.

Dikarenakan banyaknya kerugian dan dampak negatif yang dialami oleh Indonesia terkait sertifikasi RSPO. Indonesia mengeluarkan sertifikasi ISPO pada tahun 2011. ISPO merupakan suatu respon terhadap RSPO. ISPO yang merupakan suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia dengan tujuan meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar dunia. ISPO yang bersifat wajib ini dianggap lebih cocok dengan situasi di Indonesia daripada RSPO. Namun, sertifikasi ISPO ini dinilai masih baru oleh *buyer* CPO.

Dari penjelasan diatas, saran yang dapat peneliti sampaikan kepada Pemerintah Indonesia adalah perlunya upaya yang lebih banyak lagi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk bisa mempromosikan sertifikasi ISPO kepada *buyer*. Disamping itu, diharapkan kepada pemerintah Indonesia untuk meningkatkan lembaga sertifikasi yang menerbitkan sertifikasi ISPO pada perkebunan sawit. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2015 baru ada 3 lembaga.

Selain itu, saran peneliti selanjutnya yaitu diharapkan kepada pemerintah Indonesia untuk mengusahakan konvergensi antara ISPO dan RSPO. hal tersebut untuk memudahkan perusahaan – perusahaan perkebunan yang telah memiliki sertifikat ISPO, tidak menghabiskan banyak biaya lagi untuk mendapatkan sertifikat RSPO.

Oleh karena itu, perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa dapat dipertahankan dan ditingkatkan lagi.